

Merancang Pembelajaran Tanpa Dukungan Inklusif: Pengalaman Guru Sekolah Dasar Negeri Non Inklusi dalam Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus

Ersi Jati Semiyar, Karsono, Akhmad Arif Musadad

Universitas Sebelas Maret
karsono80@staff.uns.ac.id

Article History

received 30/6/2026

accepted 31/8/2026

published 18/9/2026

Abstract

The presence of students with special needs in regular schools creates challenges for teachers, particularly in schools that have not been designated as inclusive schools. This study aimed to explore teachers' experiences in planning learning for students with special needs in non-inclusive public elementary schools. The study employed a qualitative descriptive approach through semi-structured interviews and document analysis. Participants consisted of four classroom teachers from two public elementary schools in Gladagsari District, Boyolali Regency. Data were analyzed through data reduction, coding, categorization, theme identification, and interpretation. The findings revealed five major themes: teachers' understanding of inclusive education, adaptation of learning objectives, modification of learning materials and activities, flexibility in assessment and learning support, and limited inclusive support systems. Teachers developed various adaptive strategies, including flexible learning targets, task modification, peer tutoring, and individualized assessment. However, the absence of special education teachers, limited professional training, and inadequate institutional support remained significant challenges. The study highlights the importance of strengthening systemic support to enhance inclusive practices in non-inclusive schools.

Keywords: elementary school, inclusive education, learning planning, special needs students, teacher experience

Abstrak

Keberadaan siswa berkebutuhan khusus di sekolah reguler menghadirkan tantangan bagi guru, terutama pada sekolah yang belum berstatus sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi pengalaman guru dalam merancang pembelajaran bagi siswa berkebutuhan khusus di sekolah dasar negeri non inklusi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara semi-terstruktur dan studi dokumen. Partisipan penelitian terdiri atas empat guru kelas dari dua sekolah dasar negeri non inklusi di Kecamatan Gladagsari, Kabupaten Boyolali. Data dianalisis melalui reduksi data, pengkodean, kategorisasi, identifikasi tema, dan interpretasi temuan. Hasil penelitian menunjukkan lima tema utama, yaitu pemahaman guru tentang pendidikan inklusif, adaptasi tujuan pembelajaran, modifikasi materi dan aktivitas pembelajaran, fleksibilitas asesmen dan dukungan pembelajaran, serta keterbatasan dukungan inklusif. Guru mengembangkan berbagai strategi adaptif melalui penyesuaian target belajar, modifikasi tugas, tutor sebaya, dan asesmen yang fleksibel. Namun demikian, ketiadaan Guru Pembimbing Khusus, terbatasnya pelatihan, dan minimnya dukungan institusional masih menjadi tantangan utama. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan dukungan sistemik untuk meningkatkan kualitas layanan pembelajaran bagi siswa berkebutuhan khusus di sekolah non inklusi.

Kata kunci: pendidikan inklusif, perencanaan pembelajaran, siswa berkebutuhan khusus, pengalaman guru, sekolah dasar



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara tanpa terkecuali, termasuk bagi anak berkebutuhan khusus. Prinsip tersebut sejalan dengan semangat pendidikan inklusif yang menempatkan seluruh peserta didik sebagai bagian dari komunitas belajar yang sama serta memperoleh kesempatan yang setara untuk berkembang sesuai dengan potensi dan kebutuhannya. UNESCO (2018) menegaskan bahwa pendidikan inklusif tidak hanya berkaitan dengan akses terhadap pendidikan, tetapi juga memastikan partisipasi dan keberhasilan belajar seluruh peserta didik melalui penghapusan berbagai hambatan dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, sekolah dan guru memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan belajar yang mampu mengakomodasi keberagaman karakteristik peserta didik.

Perkembangan implementasi pendidikan di Indonesia menunjukkan bahwa siswa berkebutuhan khusus tidak hanya bersekolah di satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif, tetapi juga di sekolah reguler yang belum memiliki status sebagai sekolah inklusi. Fenomena tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan jumlah sekolah inklusi, pertimbangan jarak tempuh, serta keinginan orang tua agar anak tetap belajar di sekolah terdekat bersama teman sebaya. Konsekuensinya, guru di sekolah non inklusi harus melaksanakan pembelajaran bagi peserta didik dengan karakteristik yang semakin heterogen meskipun belum memperoleh dukungan sistem yang memadai, seperti Guru Pembimbing Khusus (GPK), program pembelajaran individual, maupun layanan asesmen profesional.

Kondisi tersebut tampak pada sekolah dasar negeri di Kecamatan Gladagsari, Kabupaten Boyolali. Berdasarkan data Koordinator PAUD Dikdas dan LS Kecamatan Gladagsari, jumlah siswa berkebutuhan khusus yang belajar di sekolah dasar negeri mengalami peningkatan dari 55 siswa pada tahun 2025 menjadi 71 siswa pada tahun 2026. Sebagian besar siswa merupakan *slow learner*, disertai variasi hambatan lain seperti hambatan intelektual ringan, kesulitan belajar spesifik, dan gangguan perilaku. Meskipun demikian, dari 21 sekolah dasar negeri yang ada, hanya satu sekolah yang berstatus rintisan sekolah inklusi. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian besar guru kelas reguler harus memberikan layanan pembelajaran kepada siswa berkebutuhan khusus tanpa dukungan layanan pendidikan inklusif secara formal.

Situasi tersebut menghadirkan tantangan yang kompleks dalam proses pembelajaran. Guru tidak hanya dituntut mencapai target kurikulum bagi seluruh peserta didik, tetapi juga menyesuaikan tujuan pembelajaran, materi, aktivitas belajar, serta asesmen agar tetap dapat mengakomodasi kebutuhan individual siswa berkebutuhan khusus. Pada saat yang sama, guru harus menjaga dinamika pembelajaran kelas, mengelola interaksi antarsiswa, dan menyelesaikan berbagai tuntutan administratif sekolah. Dengan keterbatasan sumber daya yang tersedia, berbagai keputusan pembelajaran sering kali dibangun berdasarkan pengalaman profesional, refleksi pribadi, dan penyesuaian yang berkembang selama proses pembelajaran berlangsung.

Perencanaan pembelajaran merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Perencanaan yang baik memungkinkan guru mengidentifikasi tujuan pembelajaran, menentukan strategi, memilih media, serta merancang asesmen yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dalam konteks pendidikan inklusif, perencanaan pembelajaran tidak hanya berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran, tetapi juga menjadi sarana untuk memastikan bahwa setiap siswa memperoleh kesempatan belajar yang bermakna sesuai dengan karakteristiknya (Darling-Hammond, 2017). Oleh karena itu, kemampuan guru dalam melakukan adaptasi pembelajaran menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan siswa berkebutuhan khusus.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas penyelenggaraan pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus dari berbagai perspektif. Rahmawati dan Filasofa

(2025) mengkaji kendala sekolah non inklusi dalam menerima siswa berkebutuhan khusus dengan menitikberatkan pada aspek kebijakan penerimaan peserta didik di sekolah reguler. Sekarpertiwi (2025) menganalisis sistem pendidikan alternatif pada taman kanak-kanak non inklusi dengan fokus pada mekanisme penerimaan anak berkebutuhan khusus. Ramayani (2024) meneliti implementasi kebijakan pendidikan inklusi pada tingkat Madrasah Ibtidaiyah dan menyoroti kesesuaian pelaksanaan kebijakan dengan regulasi yang berlaku. Sementara itu, Hidayat (2022) menelaah implementasi pendidikan inklusif di sekolah dasar melalui perspektif kebijakan dan praktik pembelajaran diferensiasi. Pada konteks internasional, Ainscow (2020) menegaskan bahwa pengembangan pembelajaran yang inklusif memerlukan perubahan budaya sekolah, peningkatan kapasitas guru, serta dukungan sistem pendidikan yang berkelanjutan.

Meskipun memberikan kontribusi penting bagi pengembangan pendidikan inklusif, penelitian-penelitian tersebut lebih banyak berorientasi pada kebijakan, sistem penerimaan peserta didik, implementasi pendidikan inklusif, maupun strategi pembelajaran diferensiasi. Kajian yang secara khusus mengungkap pengalaman guru dalam merancang pembelajaran bagi siswa berkebutuhan khusus di sekolah dasar negeri non inklusi masih relatif terbatas. Padahal, pada konteks tersebut guru harus mengambil berbagai keputusan pembelajaran tanpa dukungan sistem inklusif yang memadai. Kondisi tersebut memungkinkan munculnya berbagai bentuk adaptasi yang berkembang dari pengalaman mengajar, refleksi profesional, serta respons guru terhadap situasi nyata di kelas. Ruang kajian inilah yang belum banyak dijelaskan dalam penelitian sebelumnya.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kontribusi melalui pengungkapan pengalaman guru dalam merancang pembelajaran bagi siswa berkebutuhan khusus di sekolah dasar negeri non inklusi. Fokus penelitian tidak hanya mengidentifikasi bentuk adaptasi yang dilakukan guru, tetapi juga menjelaskan bagaimana pemahaman guru mengenai pendidikan inklusif memengaruhi penyusunan tujuan pembelajaran, modifikasi materi, penyesuaian aktivitas belajar, penggunaan tutor sebaya, serta pengembangan asesmen yang lebih fleksibel dalam kondisi keterbatasan dukungan sistem. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran empiris mengenai praktik adaptif yang berkembang secara kontekstual pada sekolah reguler yang belum berstatus sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengalaman guru dalam merancang pembelajaran bagi siswa berkebutuhan khusus di sekolah dasar negeri non inklusi serta mengungkap berbagai bentuk adaptasi pembelajaran yang berkembang dalam kondisi keterbatasan dukungan sistem inklusif. Penelitian ini diharapkan menghasilkan pemahaman empiris mengenai praktik pembelajaran adaptif yang dikembangkan guru sebagai dasar penguatan kompetensi profesional, pengembangan model pembelajaran yang lebih responsif terhadap keberagaman peserta didik, serta penyusunan kebijakan pendidikan yang mendukung peningkatan kualitas layanan bagi siswa berkebutuhan khusus di sekolah dasar negeri non inklusi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain *Interpretative Phenomenological Analysis* (IPA) untuk memahami pengalaman guru dalam merancang pembelajaran bagi siswa berkebutuhan khusus di sekolah dasar negeri non inklusi. Pendekatan IPA dipilih karena memungkinkan peneliti mengungkap makna pengalaman partisipan secara mendalam melalui interpretasi terhadap pengalaman yang mereka alami (Smith, Flowers, & Larkin, 2009; Creswell & Poth, 2018). Penelitian dilaksanakan di tiga sekolah dasar di Kecamatan Gladagsari, Kabupaten Boyolali, yang terdiri atas dua sekolah dasar negeri non inklusi dan satu sekolah dasar rintisan inklusi sebagai pembanding konteks. Siswa berkebutuhan khusus yang menjadi

konteks pembelajaran meliputi dua siswa dengan hambatan penglihatan kategori tinggi, satu siswa dengan *Attention Deficit Hyperactivity Disorder* (ADHD), dan satu siswa dengan autisme. Partisipan penelitian terdiri atas empat guru kelas yang dipilih secara purposive berdasarkan pengalaman mengajar siswa berkebutuhan khusus.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi pembelajaran, studi dokumen, dan *Focus Group Discussion* (FGD). Analisis data mengikuti tahapan IPA yang meliputi pembacaan berulang, initial noting, pengembangan tema emergen, pembentukan tema superordinat, analisis idiografis setiap kasus, serta interpretasi lintas kasus. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi teknik dan sumber, member checking, serta diskusi hasil dengan para ahli untuk meningkatkan kredibilitas temuan (Lincoln & Guba, 1985).

Tabel 1. tabel karakteristik partisipan

Kode Partisipan	Jenis Kelamin	Jabatan	Lama Mengajar	Sekolah
G1	Perempuan	Guru Kelas	12 tahun	Sekolah A
G2	Laki-laki	Guru Kelas	8 tahun	Sekolah B
G3	Laki-laki	Guru Kelas	5 tahun	Sekolah C
G4	Laki-laki	Guru Kelas	15 tahun	Sekolah C

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis data menggunakan *Interpretative Phenomenological Analysis* (IPA) menghasilkan lima tema utama yang menggambarkan pengalaman guru dalam merancang pembelajaran bagi siswa berkebutuhan khusus di sekolah dasar negeri non inklusi. Tema-tema tersebut diperoleh melalui interpretasi terhadap pengalaman empat guru kelas dan diverifikasi melalui wawancara, observasi, studi dokumen, serta *Focus Group Discussion* (FGD). Triangulasi antar sumber data menunjukkan adanya pola yang konsisten mengenai cara guru merespons keterbatasan dukungan pendidikan inklusif dalam praktik pembelajaran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran yang dikembangkan guru tidak sepenuhnya mengacu pada prosedur formal pendidikan inklusif, tetapi berkembang secara kontekstual sebagai respons terhadap kebutuhan nyata peserta didik. Guru melakukan berbagai penyesuaian berdasarkan pengalaman mengajar, pembelajaran mandiri, kolaborasi dengan rekan sejawat, serta komunikasi dengan orang tua. Praktik tersebut menghasilkan pembelajaran yang adaptif dan fleksibel sesuai karakteristik siswa dan dinamika kelas. Temuan ini menunjukkan bahwa kualitas layanan pembelajaran bagi siswa berkebutuhan khusus di sekolah dasar negeri non inklusi tidak hanya ditentukan oleh kompetensi guru, tetapi juga dipengaruhi oleh dukungan lingkungan sekolah dan kesempatan guru untuk merefleksikan praktik pembelajaran yang telah dilaksanakan. Lima tema utama yang menjadi dasar pembahasan artikel disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Sintesis Temuan Penelitian

Tema	Sintesis Temuan
Pemahaman guru terhadap pendidikan inklusif	Pemahaman guru berkembang melalui pengalaman mengajar, pelatihan, belajar mandiri, dan interaksi langsung dengan siswa berkebutuhan khusus. Pemahaman tersebut menjadi dasar dalam menerima keberagaman peserta didik dan memengaruhi keputusan pembelajaran.

Adaptasi pembelajaran secara kontekstual	Guru melakukan penyesuaian tujuan pembelajaran, penyederhanaan materi, modifikasi tugas, penggunaan tutor sebaya, pendampingan individual, pengaturan tempat duduk, serta asesmen yang fleksibel sesuai kemampuan peserta didik. Adaptasi lebih banyak berkembang selama pembelajaran daripada tertulis dalam perangkat ajar.
Modifikasi Materi dan Aktivitas Pembelajaran	Guru menyederhanakan materi, memodifikasi tugas, menggunakan media konkret, memberikan pendampingan individual, serta memanfaatkan tutor sebaya agar siswa berkebutuhan khusus tetap dapat mengikuti pembelajaran bersama teman sekelas. .
Fleksibilitas Asesmen dan Dukungan Pembelajaran	Guru menerapkan asesmen yang fleksibel melalui penyesuaian bentuk tugas, waktu pengerjaan, teknik penilaian, dan pemberian umpan balik sesuai kemampuan peserta didik. Dukungan pembelajaran juga diperkuat melalui kolaborasi dengan teman sebaya, orang tua, dan rekan guru.
Keterbatasan Dukungan Inklusif dalam Perencanaan Pembelajaran	Guru menghadapi keterbatasan kompetensi pendidikan inklusif, belum tersedianya Guru Pembimbing Khusus (GPK), belum adanya Program Pembelajaran Individual (PPI), keterbatasan media pembelajaran, serta minimnya pendampingan profesional. Kondisi tersebut mendorong guru mengembangkan berbagai strategi adaptif secara mandiri dalam merancang pembelajaran.

1. Pemahaman Guru terhadap Pendidikan Inklusif sebagai Dasar Perencanaan Pembelajaran

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemahaman guru mengenai pendidikan inklusif menjadi dasar dalam merancang pembelajaran bagi siswa berkebutuhan khusus di sekolah dasar negeri non inklusi. Guru memandang bahwa setiap peserta didik memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai karakteristik dan kebutuhannya. Pemahaman tersebut berkembang melalui pengalaman mengajar, pelatihan, belajar mandiri, serta interaksi langsung dengan siswa berkebutuhan khusus, bukan hanya melalui pendidikan formal.

Hasil observasi memperlihatkan bahwa pemahaman tersebut tercermin dalam praktik pembelajaran melalui penyederhanaan instruksi, pendampingan individual, dan penyesuaian penyampaian materi agar seluruh peserta didik dapat mengikuti pembelajaran. Studi dokumen menunjukkan bahwa perangkat pembelajaran masih menggunakan format umum dan belum memuat Program Pembelajaran Individual (PPI). Namun, lembar kerja, hasil asesmen, dan catatan perkembangan siswa memperlihatkan adanya penyesuaian target belajar, bentuk tugas, dan penilaian sesuai kemampuan peserta didik. Hasil Focus Group Discussion (FGD) menguatkan bahwa praktik tersebut berkembang dari pengalaman profesional guru dalam merespons kebutuhan belajar siswa.

Temuan ini sejalan dengan UNESCO (2018), Ainscow (2020), dan Florian (2014) yang menegaskan bahwa pembelajaran inklusif berawal dari cara pandang guru yang menghargai keberagaman peserta didik. Penelitian ini melengkapi temuan

Hidayat (2022), Ramayani (2024), serta Rahmawati dan Filasofa (2025) dengan menunjukkan bahwa pada sekolah dasar negeri non inklusi, pengalaman profesional menjadi faktor utama dalam membangun pembelajaran adaptif. Praktik tersebut juga selaras dengan Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023, Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan nomor 9 tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pelatihan Pendidikan Inklusif, serta Peraturan Direktur Jenderal Nomor 699 Tahun 2024 yang menekankan pentingnya kompetensi guru dalam menyediakan pembelajaran yang adaptif bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

2. Adaptasi Tujuan Pembelajaran sebagai Strategi Mengakomodasi Perbedaan Kemampuan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa guru mengembangkan adaptasi tujuan pembelajaran sebagai respons terhadap kebutuhan siswa berkebutuhan khusus di kelas reguler. Penyesuaian dilakukan dengan menetapkan target belajar yang lebih realistis tanpa mengubah capaian pembelajaran secara mendasar. Guru mempertimbangkan kemampuan awal, karakteristik hambatan, serta perkembangan belajar siswa sehingga tujuan pembelajaran menjadi lebih fleksibel dan kontekstual.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa guru menyesuaikan strategi pembelajaran sesuai karakteristik peserta didik. Pada siswa dengan hambatan penglihatan, pembelajaran didukung melalui penjelasan verbal, penggunaan media konkret, dan pendampingan individual. Sementara itu, siswa dengan ADHD memperoleh instruksi yang lebih sederhana, tugas bertahap, dan penguatan positif untuk membantu mempertahankan perhatian. Di sekolah rintisan inklusi, guru juga menyesuaikan aktivitas belajar bagi siswa dengan autisme melalui rutinitas yang konsisten dan arahan yang singkat. Hasil observasi memperlihatkan bahwa penyesuaian tersebut dilakukan secara berkelanjutan melalui penjelasan ulang, pengaturan tempat duduk, dan pemanfaatan tutor sebaya. Studi dokumen menunjukkan bahwa meskipun perangkat pembelajaran belum memuat modifikasi secara tertulis, penyesuaian tujuan dan aktivitas telah tercermin pada tugas, asesmen, serta catatan perkembangan siswa. Hasil Focus Group Discussion (FGD) mengonfirmasi bahwa adaptasi tersebut berkembang dari pengalaman profesional guru dalam merespons kebutuhan peserta didik.

Temuan ini sejalan dengan Tomlinson (2017) dan Florian (2014) yang menekankan pentingnya diferensiasi tujuan pembelajaran agar seluruh peserta didik memperoleh kesempatan belajar sesuai kebutuhannya. Praktik tersebut juga mendukung temuan Ainscow (2020) dan Hidayat (2022) bahwa pembelajaran inklusif memerlukan fleksibilitas dalam perencanaan. Selain itu, adaptasi yang dilakukan guru selaras dengan Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023, Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan tentang Petunjuk Teknis Pelatihan Pendidikan Inklusif, serta Peraturan Direktur Jenderal Nomor 699 Tahun 2024 yang menekankan penyediaan pembelajaran adaptif sesuai karakteristik peserta didik.

3. Modifikasi Materi dan Aktivitas Pembelajaran

Temuan penelitian menunjukkan bahwa guru memodifikasi materi dan aktivitas pembelajaran agar siswa berkebutuhan khusus tetap dapat belajar bersama teman sekelas. Modifikasi dilakukan tanpa mengubah esensi materi, tetapi melalui penyederhanaan isi, penyesuaian tingkat kesulitan tugas, penggunaan media konkret, serta pendampingan individual sesuai karakteristik peserta didik.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa guru menggunakan strategi yang berbeda sesuai kebutuhan siswa. Pada siswa dengan hambatan penglihatan, materi disampaikan melalui penjelasan verbal, media konkret, dan demonstrasi langsung. Sementara itu, siswa dengan ADHD memperoleh aktivitas belajar yang dibagi ke

dalam tahapan sederhana dengan instruksi singkat dan penguatan positif. Di sekolah rintisan inklusi, guru memodifikasi aktivitas belajar bagi siswa dengan autisme melalui rutinitas yang konsisten dan pendampingan selama mengikuti kegiatan kelas. Hasil observasi memperlihatkan bahwa guru mengulang penjelasan, memberikan contoh tambahan, serta memanfaatkan tutor sebaya agar siswa tetap terlibat dalam pembelajaran. Studi dokumen juga menunjukkan bahwa meskipun perangkat pembelajaran belum memuat modifikasi secara tertulis, lembar kerja dan tugas telah disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Hasil Focus Group Discussion (FGD) mengonfirmasi bahwa penyesuaian tersebut merupakan praktik adaptif yang berkembang dari pengalaman guru dalam mengatasi keterbatasan layanan inklusif.

Temuan ini sejalan dengan Florian (2014) dan Tomlinson (2017) yang menekankan pentingnya diferensiasi materi dan aktivitas pembelajaran agar seluruh peserta didik dapat berpartisipasi secara optimal. Penelitian ini juga memperkuat temuan Ainscow (2020) dan Hidayat (2022) bahwa pembelajaran adaptif berkembang melalui kreativitas guru dalam merespons kebutuhan peserta didik. Praktik tersebut selaras dengan Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023, Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan tentang Petunjuk Teknis Pelatihan Pendidikan Inklusif, serta Peraturan Direktur Jenderal Nomor 699 Tahun 2024 yang menegaskan pentingnya penyesuaian materi dan aktivitas pembelajaran sebagai bentuk akomodasi yang layak bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Hal ini menunjukkan bahwa kreativitas guru dalam memodifikasi materi dan aktivitas pembelajaran menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan pembelajaran yang inklusif meskipun sekolah belum memiliki dukungan sistem yang optimal.

4. Fleksibilitas Asesmen dan Dukungan Pembelajaran

Temuan penelitian menunjukkan bahwa guru menerapkan asesmen yang fleksibel agar siswa berkebutuhan khusus dapat menunjukkan kemampuan belajarnya sesuai karakteristik masing-masing. Penyesuaian dilakukan melalui modifikasi bentuk tugas, teknik penilaian, waktu penyelesaian, serta pemberian umpan balik yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Guru juga memperkuat pembelajaran melalui kolaborasi dengan teman sebaya, orang tua, dan rekan guru.

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa guru menggunakan penilaian lisan, pemberian waktu tambahan, serta penilaian yang lebih menekankan proses belajar dibandingkan hasil akhir. Guru juga memberikan scaffolding melalui pertanyaan pemantik, contoh tambahan, dan pendampingan individual ketika siswa mengalami kesulitan. Studi dokumen memperlihatkan adanya penyesuaian pada tugas, hasil asesmen, dan catatan perkembangan siswa meskipun perangkat penilaian khusus belum tersedia. Hasil Focus Group Discussion (FGD) mengonfirmasi bahwa fleksibilitas asesmen merupakan strategi yang paling memungkinkan diterapkan di sekolah dasar negeri non inklusi dalam keterbatasan layanan inklusif.

Temuan penelitian ini memperkuat hasil penelitian Ainscow (2020) dan Hidayat (2022) yang menempatkan asesmen sebagai komponen penting dalam pembelajaran inklusif. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa di sekolah dasar negeri non inklusi, fleksibilitas asesmen berkembang melalui kreativitas dan refleksi profesional guru, bukan karena tersedianya sistem asesmen khusus. Praktik tersebut selaras dengan Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 yang mengamanatkan penyediaan akomodasi yang layak dalam proses evaluasi pembelajaran bagi peserta didik penyandang disabilitas. Arah tersebut diperkuat melalui Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan tentang Petunjuk Teknis Pelatihan Pendidikan Inklusif, yang menekankan pentingnya kompetensi guru dalam merancang asesmen adaptif, serta Peraturan Direktur Jenderal Nomor 699 Tahun 2024 yang mendorong penerapan pembelajaran dan asesmen yang fleksibel, berpusat pada peserta didik, dan memperhatikan keberagaman karakteristik belajar. Dengan

demikian, fleksibilitas asesmen dan dukungan pembelajaran menjadi bagian penting dari praktik adaptif guru dalam menjaga keberlanjutan layanan pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus di sekolah dasar negeri non inklusi.

5. Keterbatasan Dukungan Inklusif dalam Perencanaan Pembelajaran

Temuan penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pembelajaran bagi siswa berkebutuhan khusus di sekolah dasar negeri non inklusi masih menghadapi berbagai keterbatasan dukungan sistem. Guru menyadari pentingnya pembelajaran yang menyesuaikan karakteristik peserta didik, namun upaya tersebut belum sepenuhnya didukung oleh ketersediaan sumber daya, perangkat pembelajaran, maupun layanan profesional. Kondisi ini menyebabkan guru lebih banyak mengandalkan pengalaman mengajar, refleksi pribadi, dan kolaborasi informal dalam menyusun pembelajaran daripada menggunakan pedoman khusus yang terstruktur.

Hasil wawancara memperlihatkan bahwa seluruh partisipan menghadapi kendala yang relatif serupa, yaitu belum tersedianya Guru Pembimbing Khusus (GPK), terbatasnya pelatihan pendidikan inklusif, serta belum adanya Program Pembelajaran Individual (PPI) sebagai acuan penyusunan pembelajaran. Guru juga mengakui masih mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa secara lebih mendalam sehingga modifikasi pembelajaran sering dilakukan berdasarkan pengamatan selama proses pembelajaran berlangsung. Meskipun demikian, keterbatasan tersebut tidak mengurangi komitmen guru untuk tetap memberikan layanan yang sesuai dengan kemampuan peserta didik.

Temuan tersebut diperkuat oleh hasil observasi yang menunjukkan bahwa guru mampu melakukan berbagai bentuk penyesuaian pembelajaran, tetapi sebagian besar dilakukan secara spontan sebagai respons terhadap situasi yang muncul di kelas. Adaptasi tujuan pembelajaran, penyederhanaan materi, pendampingan individual, maupun asesmen fleksibel belum sepenuhnya dirancang sejak tahap perencanaan karena guru belum memiliki perangkat maupun pendampingan profesional yang memadai. Studi dokumen juga memperlihatkan bahwa modul ajar yang digunakan masih bersifat umum dan belum memuat modifikasi pembelajaran maupun dokumentasi perkembangan siswa berkebutuhan khusus secara sistematis. Hasil Focus Group Discussion (FGD) mengonfirmasi bahwa kondisi tersebut masih banyak ditemukan pada sekolah dasar negeri non inklusi. Peserta FGD menekankan bahwa keterbatasan layanan bukan disebabkan oleh rendahnya komitmen guru, melainkan oleh belum optimalnya dukungan kelembagaan dalam bentuk pelatihan berkelanjutan, pendampingan profesional, serta koordinasi antar pemangku kepentingan.

Temuan ini melengkapi penelitian Rahmawati dan Filasofa (2025), Ramayani (2024), dan Hidayat (2022) yang menyoroti pentingnya dukungan kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum secara otomatis menghasilkan perubahan praktik apabila belum diikuti dengan penguatan kapasitas guru, penyediaan sumber daya, dan sistem pendampingan yang berkelanjutan. Hal tersebut sejalan dengan Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 yang mengamanatkan penyediaan akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas melalui dukungan layanan pendidikan yang sesuai kebutuhan. Arah kebijakan tersebut diperkuat oleh Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan tentang Petunjuk Teknis Pelatihan Pendidikan Inklusif, yang menempatkan pengembangan kompetensi guru sebagai strategi utama dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan inklusif, serta Peraturan Direktur Jenderal Nomor 699 Tahun 2024 yang mendorong pembelajaran adaptif melalui kolaborasi, penguatan kapasitas pendidik, dan penyediaan lingkungan belajar yang inklusif. Oleh karena itu, peningkatan kualitas perencanaan pembelajaran di sekolah dasar negeri non inklusi tidak cukup dilakukan melalui komitmen guru

semata, tetapi memerlukan dukungan kebijakan, pendampingan profesional, serta penguatan sistem sekolah agar praktik pembelajaran adaptif dapat berlangsung secara lebih terencana, berkelanjutan, dan terdokumentasi dengan baik.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa guru di sekolah dasar negeri non inklusi mampu merancang pembelajaran bagi siswa berkebutuhan khusus melalui berbagai bentuk adaptasi yang berkembang dari pengalaman profesional, meskipun belum memperoleh dukungan sistem pendidikan inklusif secara optimal. Perencanaan pembelajaran diawali dengan pemahaman guru mengenai hak belajar setiap peserta didik, kemudian diwujudkan melalui penyesuaian tujuan pembelajaran, modifikasi materi dan aktivitas belajar, serta penerapan asesmen yang fleksibel sesuai karakteristik siswa. Berbagai praktik tersebut berkembang secara kontekstual berdasarkan hasil refleksi guru terhadap kebutuhan nyata peserta didik, bukan semata-mata berdasarkan prosedur administratif atau perangkat pembelajaran yang terdokumentasi. Keterbatasan Guru Pembimbing Khusus (GPK), Program Pembelajaran Individual (PPI), pelatihan, dan pendampingan profesional menjadi faktor yang memengaruhi kualitas perencanaan pembelajaran adaptif.

Temuan ini mengimplikasikan perlunya penguatan kapasitas guru melalui pelatihan berkelanjutan, penyediaan pedoman operasional pembelajaran adaptif, serta pengembangan sistem pendampingan di sekolah dasar negeri non inklusi. Penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan model perencanaan pembelajaran adaptif yang dapat diimplementasikan pada berbagai karakteristik siswa berkebutuhan khusus serta menguji efektivitasnya terhadap peningkatan partisipasi dan hasil belajar peserta didik dalam konteks sekolah reguler.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainscow, M. (2020). *Promoting inclusion and equity in education: Lessons from international experiences*. Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 6(1), 7–16. <https://doi.org/10.1080/20020317.2020.1729587>
- Ainscow, M. (2022). *Making sense of inclusion and equity in education: A personal journey*. In *The Inclusion Dialogue* (pp. 6–22). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003263425>
- Alase, A. (2017). *The interpretative phenomenological analysis (IPA): A guide to a good qualitative research approach*. International Journal of Education and Literacy Studies, 5(2), 9–19. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1149107.pdf>
- Carney, S. (2022). *Reimagining our futures together: A new social contract for education*. *Comparative Education*, 58(4), 568–569. <https://doi.org/10.1080/03050068.2022.2102326>
- Darling-Hammond, L. (2017). *Teacher education around the world: What can we learn from international practice?* European Journal of Teacher Education, 40(3), 291–309. <https://doi.org/10.1080/02619768.2017.1315399>
- Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. (2026). *Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 9 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pelatihan Pendidikan Inklusif*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. (2024). *Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 699 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyediaan dan Penugasan Guru Pendidikan Khusus pada Unit Layanan Disabilitas*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

- Eatough, V., & Smith, J. A. (2017). *Interpretative phenomenological analysis*. In C. Willig & W. Stainton-Rogers (Eds.), *The SAGE Handbook of Qualitative Research in Psychology* (2nd ed., pp. 193–211). SAGE.
- Florian, L. (2014). *What counts as evidence of inclusive education?* *European Journal of Special Needs Education*, 29(3), 286–294. <https://doi.org/10.1080/08856257.2014.933551>
- Frearson, M., & Duncan, N. (2024). *Teachers' experiences of supporting students affected by trauma: An interpretative phenomenological analysis*. *Frontiers in Psychology*, 15, 1–14. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11199442/>
- Halim, W. H. S., Kusmarni, Y., & Wiyanarti, E. (2020). Menyikapi kehadiran siswa berkebutuhan khusus dalam pembelajaran sejarah di kelas: Perbandingan sekolah inklusi dan non-inklusi. *Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*, 3(2), 123–134. <https://doi.org/10.17509/historia.v3i2.23286>
- Hapsari, K. M., Lestari, P., Sonya, M., & Margareth, R. (2025). Kompetensi guru dalam identifikasi dan asesmen PDBK di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat. *Jurnal UNIK: Pendidikan Luar Biasa*, 10(1), 22–32. <http://dx.doi.org/10.30870/unik.v10i1.31689>
- Hartini, S., Rahman, A., & Putra, D. (2025). *Marginalization and professional identity of teachers in Indonesia: An interpretative phenomenological analysis*. *Indonesian Research Journal in Education*, 9(1), 55–72. <https://online-journal.unja.ac.id/irje/article/view/43549>
- Ilahi, M. T. (2016). Pendidikan inklusi: Konsep dan aplikasi. Ar-Ruzz Media.
- Irawati, S. A. (2023). Sekolah inklusi antara kenyataan dan realita. *Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian*, 3(2), 355–362. <https://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/dikmas/article/view/1979>
- Kawakip, A. N., Mukmin, M. I., Ayu, S. C., & Muslim, A. Q. (2023). Pengelolaan sekolah inklusi: Studi multisitus pada sekolah Islam di Jawa Timur. *Evaluasi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7(1), 103–121. <http://repository.uin-malang.ac.id/13098/>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). (2011). *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (Sesuai Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009)*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Kurniawaty, I., & Faiz, A. (2022). Konsep dilema etika dalam pengambilan keputusan: Tinjauan pustaka dalam modul guru penggerak. *Jurnal Basicedu*, 6(3), 4862–4868.
- Lalak Muslimin, L., & Muqowim, M. (2021). Peran kepala sekolah terhadap kebijakan pendidikan inklusi di tingkat sekolah dasar. *Jurnal Kependidikan*, 7(3), 708–718. <https://doi.org/10.33394/jk.v7i3.3468>
- Munajah, R., Marini, A., & Sumantri, M. S. (2021). Implementasi kebijakan pendidikan inklusi di sekolah dasar. *Jurnal Basicedu*, 5(3), 1183–1190. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i3.886>
- Noon, E. J. (2018). *Interpretive phenomenological analysis: An appropriate methodology for educational research*. *Journal of Perspectives in Applied Academic Practice*, 6(1), 75–83. <https://jpaap.napier.ac.uk/index.php/JPAAP/article/view/304>

- Ramayani, W., Puspita, S., Kurniawaty, K., Hasanah, C. S., & Wismanto, W. (2024). Penerapan kebijakan pendidikan inklusi di tingkat madrasah ibtidaiyah. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 3(2), 26–34. <https://doi.org/10.55606/concept.v3i2.1141>
- Rahmawati, I., & Filasofa, L. M. K. (2025). Achieving Inclusivity: Uncovering Constraints and Challenges in Accepting Children with Special Needs in Non-Inclusive Schools: Menggapai Inklusivitas: Menyingkap Kendala dan Tantangan di Sekolah Non-Inklusi dalam Menerima Anak Berkebutuhan Khusus. *PAUDIA: Jurnal Penelitian dalam Bidang Pendidikan Anak Usia Dini*, 525-543. <https://doi.org/10.26877/paudia.v14i3.1764>
- Romadhon, M., Marini, A., & Sumantri, M. S. (2021). Kebijakan pendidikan inklusi sebagai solusi di sekolah dasar. *Jurnal Elementaria Edukasia*, 4(1), 109–115. <https://www.academia.edu/download/81960520/2202.pdf>
- Smith, J. A., & Nizza, I. E. (2022). *Essentials of interpretative phenomenological analysis*. American Psychological Association.
- Smith, J. A., Flowers, P., & Larkin, M. (2009). *Interpretative phenomenological analysis: Theory, method and research*. SAGE Publications.
- Supriatini, S., Muhdi, M., & Yuliejantiningasih, Y. (2019). Implementasi kebijakan pendidikan inklusi di sekolah dasar negeri Kabupaten Demak. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 8(3), 1–12. <http://journal.upgris.ac.id/index.php/jmp/article/view/5400>
- Tanjung, H., Lubis, R., & Nasution, S. (2022). Hambatan implementasi pendidikan inklusif di sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 27(3), 311–325.
- Tarnoto, N. (2016). Permasalahan-permasalahan yang dihadapi sekolah penyelenggara pendidikan inklusi pada tingkat sekolah dasar. *Humanitas*, 13(1), 50–61. <https://www.academia.edu/download/73430206/2111.pdf>
- UNESCO. (2018). *Guide for ensuring inclusion and equity in education*. UNESCO.
- Van Manen, M. (2023). *Phenomenology of practice: Meaning-giving methods in phenomenological research and writing*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003228073>